



am Pos

Harian Pagi
Tribun Ba

TERBESAR, TERPERCAYA

KAMIS, 10 AGUS

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA TANJUNGPINANG

rus Perubahan Zaman



Oleh: MARGANAS NAINGGOLAN
Direktur Utama Batam Pos

KLIPPING KORAN

BATAM POS

DAN

TRIBUN BATAM

MENYERAH



[diskominfokotatanjungpinang](https://www.facebook.com/diskominfokotatanjungpinang)



[diskominfotanjungpinang](https://www.instagram.com/diskominfotanjungpinang)



tanjungpinangkota.go.id

Satpol PP Segel Lokasi Lahan

PINANGBINTAN

Tribun Batam

RABU, 26 JANUARI 2022

► Pengusaha Belum Kantongi Amdal

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Dua lokasi penimbunan lahan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau di segel dan dipasang polis line oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tanjungpinang.

Aktivitas penimbunan yang juga menggunakan alat berat di salah satu lokasinya juga turut dihentikan operasinya. Bukan tanpa alasan, pemberhentian aktivitas hingga tidak mengantongi izin dari Dinas Lingkungan Hidup. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Tanjungpinang Teguh Susanto, Selasa (25/1).

"Kita sudah koordinasi dengan DLH Tanjungpinang, dua titik lokasi itu belum mendapatkan izin Amdal. Maka dari itu aktivitasnya kita hentikan," ujarnya.

Lokasi penimbunan yang diberi garis line itu terdapat di Jalan Daeng Celak Sei Ulu Tebat (Sei Terusan), Kelurahan Kampung Bugis dan di Jalan Raja Haji Fisabilillah Kilometer 8 Atas. "Yang jalan Raja Haji Fisabilillah Km 8 Atas, setelah jembatan itu sudah kita tegur pemilikinya dan sudah tidak ada aktivitas lagi," terangnya.

Dirinya menjelaskan, lokasi rawa tersebut merupakan jalur hijau sehingga tidak boleh ditimbun ataupun dilakukan penimbunan apapun. "Mungkin karena warga melihat ada potensi perekonomian dan jelas jalur ramai maka dilakukan penebangan pohon dan rawa lantas ditimbun," sebutnya.

Senada denga itu, penimbunan lahan di Jalan Daeng Celak juga belum diketahui

secara jelas peruntukannya. Namun dirinya memaparkan telah bertemu dengan utusan dari perusahaan penimbun lahan. "Kita belum berhasil menjumpai pemiliknya, belum jelas peruntukannya untuk apa. Namun ada utusan dari perusahaan dan kita temui untuk selanjutnya dibuat berita acara penghentian sementara dan kita pasang pita line," tuturnya.

Dia mengatakan, penimbunan lahan tidak dapat dilakukan secara serampangan. Meski ada kajian yang memungkinkan penimbunan lahan di lokasi rawa, sebaiknya tetap melengkapi terlebih dahulu surat izin lingkungan hidup. "Jadi kita minta kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk tertib perizinan karena dokumen lingkungan hidup ini akan mempertimbangkan segala faktornya. Mulai dari keseimbangan dampak banjrnya ke depan," jelasnya.

Ditanyakan penimbunan lahan yang cukup luas di Jalan Daeng Celak untuk apa. "Mungkin mau bangun pertokoan atau gudang karena saya lihat lahannya cukup luas. Kita belum tahu pasti, karena karyawannya saat di lokasi juga tidak tahu peruntukannya," tukasnya.

Pantauan Tribun Batam, di lokasi penimbunan lahan tampak alat berat telah ditepikan di seberang jalan. Tanah yang cukup luas dan belum rata tersebut juga di kelilingi pita line. Puluhan batang kayu juga terlihat di ditumpuk di lokasi.

Sedang pantauan di Jalan Raja Haji Fisabilillah Kilometer 8 Atas, beberapa pohon bakau yang ditebas telah mengering dan berseakan. Terdapat tumpukan tanah yang diperkirakan baru diturunkan belum merata di lokasi, sedang pita line sudah tidak lagi mengelilingi lahan. **(nvn)**

Rahma Raker Bersama Mendagri

► Bahas Evaluasi Program Strategis Daerah

TANJUNGPINANG, TRIBUN - Wali Kota Tanjungpinang Rahma dan Wakil Walikota Endang Abdullah hadir secara virtual pada Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dari ruang rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Walikota, Senin (24/1).

Raker tersebut dalam rangka evaluasi program strategis kegiatan Pemerintah Daerah (Pemda) bersama kepala daerah dan Ketua DPRD seluruh Indonesia.

Rapat dipimpin langsung oleh Mendagri, M. Tito Karnavian, bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firlil Bahuri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Tito dalam kesempatan itu menyampaikan, evaluasi terhadap program strategis kegiatan Pemerintah Daerah dan membahas pencegahan tindak pidana korupsi.

"Untuk itu diperlukan penerapan sistem administrasi pemerintahan yang lebih transparan dan mengurangi kontak fisik. Hal itu dapat

dilakukan dengan memanfaatkan layanan digitalisasi di berbagai bidang, mulai dari perencanaan hingga eksekusi kebijakan. Hal itulah yang memunculkan konsep smart city, smart government, dan e-government," ujarnya melalui video conference.

Lebih lanjut dikatakannya, kepada seluruh kepala daerah agar segera menyiapkan Peraturan daerah terkait perubahan nomenklatur tentang Perizinan Bangunan Gedung (PBG).

"Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah atas kebijakan pergantian nomenklatur PBG, agar dipercepat pembuatan Perda terkait pergantian nomenklatur ini supaya tidak menghambat pembangunan di daerah," tutupnya.

Sementara itu, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menambahkan, orientasi LKPP dalam mendukung pemerintah yaitu memudahkan stakeholder dalam menjalankan atau mengakses belanja pemerintah dengan sistem

PINANGBINTAN

Tribun Batam

RABU, 26 JANUARI 2022



TRIBUN/IST

RAPAT KERJA - Wali Kota Tanjungpinang Rahma dan Wakil Walikota Endang Abdullah hadir secara virtual pada Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dari ruang rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Walikota, Senin (24/1).

digitalisasi untuk memberikan kemudahan dan transparansi, juga memprioritaskan produk dalam negeri dan UMKM-Koperasi.

Usai pelaksanaan rapat kerja, Rahma mengatakan, agar segera menindaklanjuti segala bentuk evaluasi dan arahan dari Presiden RI melalui Mendagri.

"Pemerintah Kota Tanjungpinang sangat mendukung untuk perbaikan atau penyempurnaan sistem tata

kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan, baik internal maupun eksternal menuju pemerintahan yang baik. Selain itu sesuai arahan Mendagri terkait Perda PBG, Pemko Tanjungpinang telah membahas sebelumnya di pihak internal bersama OPD terkait tentang Peraturan Daerah mengenai Perizinan Bangunan dan Gedung," jelas Rahma. **(nvn)**